

Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jambi (2017-2021)

Mipratul Jannah

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: mipratul20@gmail.com

Novi Mubyarto

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: novi20@gmail.com

Ahmad Syahrizal

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: ahmadsvahrizal@uinjambi.ac.id

Korespondensi penulis: mipratul20@gmail.com

Abstract : *Jambi Province is one of the regions in Indonesia that continues to face the problem of poverty. Poverty can be seen as a condition of society with a weak economic level. This poverty is also affected by unemployment. This was examined by Cutler and Katz and Fowers found that the unemployment rate is positively related to the number of people below the poverty line or in other words the higher the unemployment rate, the greater the poverty rate. This study aims to determine the effect of unemployment on the level of poverty in the province of Jambi, the method is used descriptive quantitative, with data collection techniques in this study using documentation techniques. Based on the research that has been done, the results can be concluded as follows: The results in this study are that in 2017 to 2021 unemployment has a positive and significant effect on poverty in Jambi.*

Keyword ; *Poverty, Unemployment*

Abstract: Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah di Indonesia yang terus menghadapi masalah kemiskinan. Kemiskinan dapat dilihat sebagai keadaan masyarakat dengan tingkat ekonominya yang masih lemah, Kemiskinan ini di pengaruhi juga oleh pengangguran. Hal ini di teliti oleh cutler and katz and fowers menemukan bahwa tingkat pengangguran berhubungan positif dengan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan atau dengan kata lain semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin besar tingkat kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di provinsi jambi, metode di gunakan kuantitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hasilnya sebagai berikut: Adapun hasil pada penelitian ini yaitu pada tahun 2017 sampai 2021 pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jambi.

Keyword ; Kemiskinan, Pengangguran

LATAR BELAKANG

Negara Indonesia mengukur kemiskinan menggunakan standar dari BPS (Badan Pusat Statistic). BPS telah menetapkan metode keinginan sederhana sebagai kriteria untuk mengukur kemiskinan. Dimana metode keinginan sederhana terutama didasarkan sepenuhnya pada pembatasan pengeluaran orang minimal untuk makan yang sama dengan 2100 energi sesuai dengan konsumsi harian dan non-makan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi asupan makan dan non makannya melalui pendapatannya. Kemiskinan biasanya didefinisikan sebagai rendahnya pendapatan seseorang untuk memenuhi keinginan mendasar. Ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi keinginannya karena penghasilannya yang sekarang tidak lagi mencukupi akan membawanya pada garis kemiskinan.

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan. Dan kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi banyak negara. Kemiskinan juga merupakan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradapan, sehingga semua orang sepakat bahwa kemiskinan harus ditanggulangi. Strategi penanggulangan kemiskinan berhubungan dengan tersedianya data kemiskinan yang akurat, supaya kebijakan yang dilakukan pemerintah menjadi tepat sasaran.

Tabel 1.1

Jumlah Kemiskinan Menurut Kabupaten / Kota Di Provinsi Jambi Tahun 2017-2021(Ribu Jiwa dan %)

Kabupaten/Kota	2017	persen	2018	persen	2019	persen	2020	persen	2021	persen	Rata-rata	Rata-rata %
Kerinci	17,62	7.45	16,79	7.07	17	7.13	17,48	7.3	18,45	7.71	17.47	7.33
Merangin	35,48	9.43	33,95	8.88	32,38	8.48	33,92	8.63	35,44	9.11	34.23	8.91
Sarolangun	25,61	8.87	25,7	8.73	25,39	8.45	25,79	8.42	27,06	8.87	25.91	8.67
Batanghari	27,49	10.33	27,55	10.23	26,53	9.75	26,54	9.65	27,24	10.05	27.07	10.00
Muaro Jambi	18,28	4.37	17,38	4.05	16,86	3.83	17,3	3.83	20,49	4.53	18.06	4.12
Tanjung Jabung Timur	27,22	12.58	26,99	12.38	25,35	11.54	24,23	10.95	24,42	11.39	25.64	11.77
Tanjung Jabung Barat	36,33	11.32	36,28	11.1	35,12	10.56	34,79	10.29	36,1	10.75	35.72	10.80
Tebo	23,18	6.79	22,86	6.58	22,83	6.47	22,47	6.26	23,77	6.68	23.02	6.56
Bungo	20,81	5.82	21,11	5.78	20,87	5.6	22,07	5.8	23,64	6.23	21.7	5.85
Kota Jambi	52,08	8.84	50,61	8.49	48,95	8.12	50,44	8.27	54,23	9.02	51.47	8.55
Kota Sungai Penuh	2,46	2.78	2,48	2.76	2,55	2.81	2,78	3.03	3,03	3.41	2.66	2.96
Provinsi Jambi	286,55	8.19	281,69	7.92	274,32	7.6	277,8	7.58	293,86	8.09	282.84	7.88

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Tabel 1.1 di atas menjelaskan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Secara keseluruhan tingkat keiskinan di provinsi jambi rata-rata 282.84 ribu jiwa atau setara dengan 7,88% yang berarti bahwa 7,88% dari penduduk Provinsi Jambi adalah penduduk miskin. Tahun 2017 tingkat kemiskinan cenderung turun hingga tahun 2019 kemudian kembali meningkat di tahun 2020 hingga tahun 2021.

Terdapat 6 Kabupaten kota dengan tingkat kemiskinan di atas rata-rata provinsi jambi yaitu Kabupaten Merangin 8.97 %, Kabupaten Sarolangun 8.67%, Kabupaten Batanghari 10.00%, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 11.77%, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 10.80%, Kota Jambi 8.55%, sedangkan kabupaten kota lainnya dengan tingkat kemiskinan dibawah tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi. Tahun 2021 tingkat

kemiskinan tertinggi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 11.4 %, dan tingkat kemiskina terendah terlihat di Kota Sungai Penuh 3.41%.Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah di Indonesia yang terus menghadapi masalah kemiskinan. Kemiskinan dapat dilihat sebagai keadaan masyarakat dengan tingkat ekonominya yang masih lemah, dan ditambah dengan kebijakan pemerintah yang umumnya diarahkan untuk memecahkan permasalahan jangka pendek. Sehingga kebijakan tersebut belum berhasil memecahkan kelompok ekonomi rakyat bawah.kemiskian ini di pengaruhi juga oleh pengangguran. Tingkat kemiskinan di suatu Negara tentunya tidak terlepas dari kinerja variabel-variabel ekonomi makro di Negara yang bersangkutan. Hal ini di teliti oleh cutler and katz and fowers menemukan bahwa tingkat pengangguran berhubungan positif dengan jumlah penduduk yang berada di bahwa garis kemiskinan atau dengan kata lain semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin besar tingkat kemiskinan. selanjutnya studi yang di lakukan balke and slottje yang menguji hubungan antara variabel- ekonomi makro dan tingkat kemiskinan di us menyimpulkan bahwa pengangguran berdampak buruk pada kemiskinan.

Kemiskinan biasanya digambarkan sebagai gaji rendah individu untuk mengatasi masalah mendasar. Ketidakberdayaan seseorang untuk mengatasi masalahnya karena dia tidak memiliki gaji yang memadai akan membuatnya berada di garis kemiskinan. Pengertian pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum memulai bekerja. Dengan asumsi jumlah pengangguran tinggi, itu berarti bahwa banyak orang tidak memiliki gaji untuk mengatasi masalah mereka, sehingga mengurangi kebutuhan mereka.

Tabel 1.2
Jumlah Pengangguran Di Provinsi Jambi (Ribu Jiwa dan %)

kabupaten /kota	2017	Persen	2018	Pesen	2019	Persen	2020		2021	persen	Rata-rata	Rata-rata %
KERINCI	40,65	3,26	37,21	2,89	33,41	2,75	31,67	2,43	31,07	2,32	34.8	2.73
MERANGIN	77,38	4,10	70,31	3,64	74,13	3,80	97,47	4,86	97,52	4,83	83.36	4.27
SAROLANGUN	32,27	2,25	59,05	4,18	59,85	2,24	85,85	5,71	80,10	5,52	63.42	3.89
BATANGHARI	44,14	3,57	51,16	4,01	56,67	4,70	59,35	4,42	59,07	4,26	54.08	4.19
MUARO JAMBI	102,76	5,39	94,64	4,66	103,02	5,29	111,84	5,43	120,03	5,59	106.46	5.27
TANJUNG JABUNG TIMUR	28,77	2,36	21,61	1,85	19,84	1,71	17,10	1,41	18,32	1,56	21.13	1.78
TANJUNG JABUNG BARAT	49,71	3,07	43,95	2,46	45,55	2,67	39,78	2,16	46,66	2,53	45.13	2.58
TEBO	34,44	1,98	36,91	2,07	54,31	2,99	54,88	2,95	52,84	2,83	46.68	2.56
BUNGO	82,48	4,89	54,98	3,09	68,32	3,93	106,34	5,94	104,87	5,86	83.4	4.74
KOTA JAMBI	157,54	5,55	194,88	6,56	206,35	6,72	310,68	10,5	313,75	10,66	236.64	7.99
KOTA SUNGAI PENUH	18,02	4,14	26,05	5,44	18,20	4,17	24,94	5,56	13,31	3,00	20.1	4.46
PROVINSI JAMBI	668,16	3,87	690,75	3,86	739,65	4,19	939,90	5,13	937,54	5,09	795.2	4.43

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Jika di lihat dari tingkat pengangguran di provinsi jambi secara total trus mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir,begitu pula tingkat pengangguran di antar kabupaten kota dimana kota jambi yang memiliki tingkat pengangguran paling tinggi yaitu 313,75 ribu jiwa sementara tingkat pengangguran paling tendah berdasarkan di

kabupaten kota, di kota sungai penuh 13,31 ribu jiwa di tahun 2021. Secara jumlah tingkat pengangguran di kota sungai penuh memang paling rendah padatahun 2021 namun di liat secara persen tingkat pengangguran ter tendah berada dikabupaten tanjung jabung timur dimana tingkat pengangguran nya sebesar 1,56 %. Terdapat kesenjangan atara teori dan pakta dimana secara teori mengatakan bahwa apabila tingkat pengangguran naik maka tingkat kemiskinan juga ikut naik. Namun fakta nya berbeda, sesuai dengan perbandingan antara tabel 1.1 dengan tabel 1.2 dimana di lihat jumlah total dimana tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi di 3 tahun perama mengalami penurunan dan kembali meningkat di 2 tahun terakhir sedangkan pengangguran di lihat dari jumlah total trus mengalami kenaikan.

Upaya menurunkan tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan adalah sama pentingnya. Secara teori jika masyarakat tidak menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan dengan penghasilan yang dimiliki dari bekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka tidak akan miskin. Sehingga dikatakan dengan tingkat pengangguran rendah (kesempatan kerja tinggi) maka tingkat kemiskinan juga rendah. Pengangguran adalah seseorang yang saat ini dicirikan dalam angkatan kerja, yang secara efektif mencari pekerjaan pada tingkat gaji tertentu, namun tidak mendapatkan posisi yang mereka butuhkan. Dengan asumsi jumlah pengangguran tinggi, itu berarti bahwa banyak orang tidak memiliki gaji untuk mengatasi masalah mereka, sehingga mengurangi kebutuhan mereka. Pengangguran adalah masalah yang terus menerus untuk diperiksa.

KAJIAN TEORITIS

1. Pengangguran

a. Definisi Pengangguran

Menurut Sukirno, pengangguran adalah suatu kondisi yang dihadapi oleh sekelompok pekerja yang telah berusaha mencari pekerjaan tetapi belum menemukannya. Pengangguran merupakan masalah umum dalam perekonomian, terutama di negara berkembang. Pengangguran adalah ketika pekerja tidak dapat menemukan pekerjaan yang mereka inginkan dan butuhkan. Dengan kata lain, pengangguran merujuk pada situasi atau keadaan di mana seseorang menghadapi ketidakadaan kesempatan kerja.

b. Teori Pengangguran

Menurut Adam Smith dan Davit Ricardo berpendapat bahwa meningkatnya pengangguran di suatu daerah di sebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk, karena penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja, maka ketika penduduk yang banyak tanpa danya penyediaan lapangan pekerjaan yaga banyak pula maka akan mengakibatkan pengangguran semakin banyak.

c. Jenis-Jenis Pengangguran

Pengangguran tidak selalu merupakan pertanda bahwa seseorang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Orang yang sudah bekerja dan sedang menjalankan pekerjaannya dapat dikatakan menganggur karena pengertian pengangguran dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu waktu, identitas kerja, dan produktivitas. Berikut adalah beberapa jenis pengangguran, yaitu:

1) Pengangguran friksional atau normal , perekonomian berada dalam kesempatan kerja penuh (*full employment*) pengangguran sebesar dua hingga empat persen tersebut di pandang sebagai pengangguran normal atau friksional (*normal or frictional unemployment*).

2) Pengangguran struktural

Pengangguran struktural disebabkan oleh perubahan cara ekonomi terstruktur. Beberapa industri dan perusahaan dalam perekonomian suatu negara akan mengalami penurunan perkembangannya Penurunan ini kemungkinan akan mengakibatkan produksi industri mengalami penurunan, yang akan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) dan munculnya pengangguran.

3) Pengangguran siklikal

Pengangguran disebabkan oleh turunnya harga komoditas primer yang mengakibatkan turunnya produksi komoditas tersebut. Penurunan harga disebabkan oleh penurunan permintaan luar negeri, yang berarti bahwa output perusahaan turun. Perusahaan mengurangi tenaga kerjanya untuk mengurangi pengangguran.

4) Pengangguran musiman

Pengangguran sesekali ini terkait erat dengan perubahan sesaat dalam pergerakan moneter, terutama di daerah pedesaan. Misalnya, di luar musim tanam dan panen, para peternak sebagian besar menganggur, menunggu musim tanam dan panen berikutnya.

5) Pengangguran mekanis

Pengangguran mekanis disebabkan oleh perubahan inovatif, dari yang mudah hingga saat ini. Tenaga manusia digantikan oleh tenaga mesin sehingga tenaga kerja terputus dari organisasi

6) Pengangguran politik

Pengangguran ini disebabkan karena akibat adanya peraturan-peraturan pemerintah yang secara langsung atau tidak mengakibatkan pengangguran.

7) Setengah pengangguran (underemployment)

Tenaga kerja yang termasuk setengah menganggur adalah kelompok tenaga kerja yang lamanya bekerja (dalam satuan hari, jam, ataupun minggu) kurang dari yang seharusnya mereka kerjakan.

8) Pengangguran terbuka (open unemployment)

Pengangguran terbuka dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a) Pengangguran sukarela, merupakan kelompok angkatan kerja yang memilih tidak bekerja karena tidak bersedia di gaji pada jumlah tertentu maupun mengharapkan pekerjaan yang lebih baik.

b) Pengangguran terpaksa, merupakan kelompok angkatan kerja yang bersedia bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Pengangguran terbuka terdiri dari:

1. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan
2. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha
3. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan.

4. Mereka yang memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

d. Penyebab Pengangguran

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi
2. Keterbatasan jumlah lapangan kerja, sehingga tidak mampu menampung seluruh pencari kerja.
3. Keterbatasan kemampuan yang dimiliki pencari kerja, sehingga pencari kerja tidak mampu mengisi lowongan kerja karena tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan keterampilan yang diperlukan.
4. Keterbatasan informasi, yakni tidak memiliki informasi dunia usaha mana yang memerlukan tenaga kerja serta persyaratan apa yang diperlukan.
5. Tidak meratanya lapangan kerja. Daerah perkotaan banyak tersedia lapangan pekerjaan sedangkan di pedesaan sangat terbatas.
6. Kebijakan pemerintah yang tidak tepat, yakni pemerintah tidak mampu mendorong perluasan dan pertumbuhan sektor modern.
7. Rendahnya upaya pemerintah untuk melakukan pelatihan kerja guna meningkatkan skill pencari kerja.
8. Rendahnya kualitas pendidikan masyarakat
9. Strategi industri labor saving
10. Budaya Pilih-Pilih Pekerjaan
11. Harapan untuk calon pekerja terlalu tinggi

e. Macam-macam pengangguran

Pengelompokan masing-masing pengangguran, menurut Edgar O. Edwards, harus memperhatikan dimensi-dimensi sebagai berikut:

- 1) Waktu (banyak di antara pekerja yang ingin bekerja lebih lama, misal jam kerjanya per hari, per minggu, atau pertahun).
- 2) Intensitas pekerjaan (yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi makanan).
- 3) Produktivitas (kurangnya produktivitas seringkali disrebabkan oleh kurangnya sumber daya komplementer untuk melakukan pekerjaan).

Berdasarkan hal tersebut Edwards membedakan lima bentuk pengangguran, yaitu:

- a. Pengangguran terbuka; baik sukarela (tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik) maupun karena terpaksa (mau bekerja tetapi tidak mendapat pekerjaan).
- b. Setengah menganggur (underemployment); yaitu mereka yang bekerja lamanya kurang dari yang mereka kerjakan (hari, minggu, atau musiman).
- c. Tampak bekerja tetapi tidak bekerja penuh yaitu mereka yang tidak digolongkan sebagai pengangguran terbuka dan setengah menganggur, antara lain:
 1. Pengangguran tak kentara (disguised unemployment), misalnya seseorang bekerja sehari penuh, padahal pekerjaan itu sebenarnya tidak memerlukan waktu sehari penuh.
 2. Pengangguran tersembunyi (hidden unemployment), yaitu orang bekerja tidak sesuai dengan tingkat dan jenis pendidikannya.
 3. Pensiun lebih awal, yaitu mereka yang pensiun sebelum mencapai batas usia pensiun. Di beberapa negara, usia pension dimudahkan, hal ini digunakan untuk menciptakan peluang bagi yang muda-muda untuk menduduki jabatan di atasnya.
- d. Tenaga kerja yang lemah (impaired), yaitu mereka yang bekerja full time, tetapi intensitasnya lemah karena kurang gizi atau penyakit.
- e. Tenaga kerja yang tidak produktif, yaitu mereka yang mampu bekerja secara produktif, tetapi karena kurang sumber daya penolong yang memadai maka mereka tidak bisa menghasilkan sesuatu dengan baik.

2. kemiskinan

a) Definisi kemiskinan

Kemiskinan dapat dilihat sebagai keadaan masyarakat dengan tingkat ekonominya yang masih lemah, dan ditambah dengan kebijakan pemerintah yang umumnya diarahkan untuk memecahkan permasalahan jangka pendek. Sehingga kebijakan tersebut belum berhasil memecahkan kelompok ekonomi rakyat bawah. Di samping itu juga pengaruh keadaan luar negeri, antara lain dari segi pendanaan pembangunan.

b) Ukuran Kemiskinan

Kemiskinan memiliki implikasi yang luas dan tidak mudah diukur. Namun, bagian ini menjelaskan dua indikator kemiskinan yang paling umum digunakan.

1. Kemiskinan Absolut

Diperkirakan dengan sangat baik dengan membandingkan tingkat gaji individu dan tingkat gaji yang diharapkan untuk memperoleh kebutuhan esensial mereka. Tingkat gaji pokok adalah penghalang antara keadaan miskin dan tidak beruntung atau sering disebut sebagai garis kebutuhan. Ide ini sering disinggung sebagai kebutuhan langsung. Direncanakan untuk memutuskan tingkat gaji dasar yang memadai untuk mengatasi masalah aktual, seperti makanan, pakaian, dan penginapan untuk menjamin daya tahan.

Kesulitan dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal ini tidak hanya dipengaruhi oleh adat, tetapi juga oleh tingkat kemajuan suatu negara, dan berbagai faktor ekonomi lainnya.

2. Kemiskinan Relatif

Mengingat gagasan ini, garis kemiskinan akan berubah dengan asumsi bahwa tingkat kehidupan individu berubah. Ide ini merupakan peningkatan dari ide kebutuhan langsung, dan mengingat fakta bahwa ide kemiskinan relatif bersifat dinamis, kebutuhan akan terus ada. Orang-orang yang saat ini memiliki tingkat gaji yang dapat mengatasi masalah-masalah penting namun masih jauh lebih rendah dari keadaan di lingkungan sekitar, maka pada saat

itu, orang tersebut masih dianggap miskin. Hal ini terjadi karena kebutuhan lebih banyak diselesaikan oleh kondisi yang ada, daripada iklim individu yang bersangkutan.

c) Teori Kemiskinan Struktural Fungsional

Menurut teori fungsional yang dinyatakan George Ritzer bahwa semua penganut teori ini berkecenderungan untuk memusatkan perhatiannya pada fungsi suatu faktor sosial terhadap faktor sosial. Sementara dalam teori yang sama Thomas O'dea menyatakan bahwa teori fungsional adalah segala yang tidak berfungsi akan lenyap dengan sendirinya. O'dea memisalkan agama, sejak dulu sampai saat ini masih ada, jelas bahwa agama mempunyai fungsi bahkan memerankan sejumlah fungsinya.

Diangkat dari teori tersebut dapat dinyatakan bahwa kemiskinan salah satu unsur dalam sistem sosial, artinya keberadaan orang miskin dapat menjaga eksistensi dari unsur lain dalam suatu sistem, dengan perkataan lain bahwa keberadaan orang miskin memperkuat posisi mereka sebagai orang kaya. Kemiskinan akan tetap ada sampai fungsi kemiskinan itu hilang dalam sosial. Menurut Herbert Gans, kemiskinan memiliki fungsional dalam sistem. Sistem sosial di Amerika, Gans melihat adanya lima belas fungsi kemiskinan yang direduksi menjadi empat kriteria, masing-masing fungsi kemiskinan, meliputi ekonomi, sosial, kultural, dan politik.

d) Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui :

1. Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin Dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar (basic life access) yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, air bersih.
2. Meningkatkan Kemampuan dan Pendapatan Penduduk Miskin.
 - a) Dilakukan melalui pola pelatihan/keterampilan kewirausahaan pemula (start up) dan bantuan modal awal;
 - b) Untuk menentukan penerima manfaat program/kegiatan agar memperhatikan kriteria yang terdapat pada data BDT 2018, antara lain:
 - 1) Status kepemilikan usaha di suatu rumah tangga, akses terhadap KUR.
 - 2) Kepemilikan lahan, asset bergerak, ternak.
 - 3) Status pendidikan tertinggi.
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil Dilakukan melalui program/kegiatan terkait fasilitasi pengembangan kewirausahaan, fasilitasi akses modal/kredit bersubsidi (jamkrida/ KUR/Mitra 25), pemberdayaan dan pendampingan berkelanjutan, sertifikasi produk/HAKI, serta menjaga stabilisasi iklim usaha dan fasilitasi pemasaran.
4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Dilakukan melalui sinergitas dokumen perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasinya, serta pengembangan kemitraan dengan melibatkan perguruan tinggi dengan KKN Tematik, TJSLP/CSR Perusahaan/BUMN/BUMD, serta mendorong pembangunan kawasan perdesaan.

f) Program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan

Program pemerintah yang sudah dijalankan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di sini hanya pada dua masa pemerintahan orde reformasi. Untuk membedakan satu dengan yang lainnya, maka dibagi menjadi dua, yaitu program zaman pemerintahan Presiden SBY dan pemerintahan Presiden Jokowi. Namun, untuk melengkapi khazanah program penanggulangan kemiskinan juga terdapat program spesifik yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial yang banyak dirasakan manfaatnya bagi rumah tangga sangat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebagaimana uraian berikut ini.

1. Program Pemerintahan Jokowi

Pemerintahan Presiden Jokowi dimulai pada tanggal 20 Oktober 2014 wah berniat melanjutkan agenda pemerintahan sebelumnya, yaitu dengan program percepatan penanggulangan kemiskinan di mana pada tanggal 3 November 2014 ditandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 166 tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan pada masa pemerintahan Jokowi yang melanjutkan dari pemerintah sebelumnya terdiri dari 3 program, yaitu:

- 1) Kartu Indonesia Sehat (KIS)
 - 2) Kartu Indonesia Pintar (KIP)
 - 3) Kartu Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS)
2. Program Kementerian Sosial

Melalui Undang-undang No.13 tahun 2014 tentang Penanganan Fakir Miskin, maka Kementerian Sosial membuat program spesifik terutama terkait dengan masalah keterlantaran, keterasingan, kemiskinan, kebencanaan, dan kecacatan di mana sudah dikenal dan dirasakan banyak manfaatnya bagi masyarakat dan rumah tangga sangat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Program-program tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Program Keluarga Harapan (PKH)
- 2) Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
- 3) Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)
- 4) Program Asistensi Lanjut Usia (Aslut)
- 5) Program Asistensi Orang dengan Cacatan (Asodk)
- 6) Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT)

Undang-undang Kesejahteraan Sosial Nomor 11 tahun 2009 membahas khusus tentang penanggulangan kemiskinan pada Bab IV, di mana kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah. BPS dan Departemen Sosial yang dikutip

1. Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendekatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan nonmaterial yang diterima seseorang. Secara luas kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Kadang-kadang, kemiskinan didefinisikan dari segi kurang atau tidak memiliki aset-aset, seperti tanah, rumah, peralatan, uang, emas, kredit dan lain-lain.
3. Kemiskinan Nonmaterial meliputi berbagai macam kebebasan, hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak, hak atas rumah tangga dan kehidupan yang layak.

g) Perspektif Kemiskinan

Kemiskinan merupakan konsep yang multidimensional sehingga untuk menganalisis masalah kemiskinan yang kronis dapat menggunakan beberapa sudut pandang. David Cox dalam Edi Suharto (2006: 132) memandang kemiskinan dalam beberapa perspektif, di antaranya sebagai berikut.

1. Kemiskinan yang diakibatkan oleh globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan yang kalah. Pemenangnya adalah negara-negara maju, sedangkan negara berkembang sering kali terpinggirkan oleh pesaing pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.
2. Kemiskinan yang terkait dengan pembangunan, yang pertama adalah kemiskinan subsisten (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kedua kemiskinan pedesaan (kemiskinan karena peminggiran pedesaan akibat proses pembangunan), dan ketiga kemiskinan perkotaan (kemiskinan).
3. Kemiskinan sosial adalah kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.
4. Kemiskinan konsekuensial adalah kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

h) Indikator Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan sesuatu yang dapat diukur sehingga muncullah istilah "Garis Kemiskinan" (Sajogio, 1973). Untuk mengukur kemiskinan, ada beberapa strategi, di antaranya adalah strategi kebutuhan dasar. Strategi kebutuhan dasar (basic needs) dan alat ukur yang dipakai untuk mengukur kemiskinan ini direkomendasikan oleh United Nations (1961), UNSRID (1966) dan pada tahun 1976 konsep ini dipromosikan dan dipopulerkan oleh

International Labour Organization (ILO). Tahun 1976 Gangguli dan Gupta juga membuat indikator kebutuhan dasar, kemudian Gren (1978) dan Hendra Asmara (1986). Untuk konteks Indonesia, kebutuhan dasar menurut Biro Pusat Statistik terdiri dari pangan dan bukan pangan yang disusun menurut daerah perkotaan dan perdesaan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Ada berbagai ukuran yang sudah baku untuk menggambarkan kemiskinan. Dua di antaranya yang paling umum digunakan adalah:

1. tingkat kemiskinan (headcount index) dihitung sebagai proporsi penduduk miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan
2. jurang pemisah (poverty gap index) menggambarkan kedalaman kemiskinan dari penduduk miskin. Ukuran ini menunjukkan berapa selisih rata-rata tingkat kehidupan penduduk miskin dengan garis kemiskinan, dinyatakan dalam persentase terhadap garis kemiskinan.

Pada level internasional, Bank Dunia menyatakan bahwa indikator utama kemiskinan adalah terbatasnya kepemilikan tanah dan modal, terbatasnya sarana dan prasarana standar, perbedaan kesempatan kerja, perbedaan pelayanan kesehatan yang layak, perbedaan kesempatan kerja yang layak, perbedaan kualitas sumber daya manusia, budaya hidup yang jelek, tata pemerintahan yang buruk (bad governance), dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan (environmental sustainable).

1. Hubungan Pengangguran dengan Tingkat kemiskinan

Menurut Sukirno efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah di capai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran disuatu negara sangat buruk, kecacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek buruk kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Realitas eksperimental menunjukkan bahwa di Wilayah Jambi, contoh hubungan umumnya tidak searah antara tingkat pengangguran dan tingkat kebutuhan. Tingkat pengangguran yang lebih tinggi memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Jadi untuk situasi ini, hubungan antara pengangguran dan kemelaratan tidak serta merta sesuai dengan asumsi hipotesis moneter yang ada, tetapi memiliki hubungan terbalik. Kekhasan ini dapat dimaknai sebagai berikut, orang yang menganggur dalam sebuah rumah tangga, tetapi ada anggota rumah tangga yang lain yang bekerja dengan tingkat pendapatan tinggi sehingga cukup untuk menyokong penganggur. Dalam kaitannya dengan kemiskinan, penganggur yang ada di rumah tangga tersebut tidak secara otomatis menjadi miskin karena ada anggota keluarga lain yang memiliki pendapatan yang cukup untuk mempertahankan keluarganya hidup berada di atas garis kemiskinan.

Fakta lain yang menjelaskan pola hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi adalah adanya kenyataan besarnya tingkat pengangguran tersembunyi (bekerja dengan jam kerja yang rendah). Rendahnya efisiensi kerja dapat diatasi dengan jam kerja serta sifat SDM yang tercermin dari rendahnya tingkat pelatihan. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka bekerja (bukan pengangguran), gaji yang didapat umumnya rendah dan di bawah garis kemiskinan. Jadi bahkan dengan tingkat pengangguran yang rendah, tingkat kemiskinan sangat tinggi.

Kenyataan lain juga dapat terjadi di Wilayah Jambi, khususnya pada kelompok keluarga yang sangat tidak mampu, tingkat penganggurannya rendah. Dalam perkumpulan keluarga kurang mampu ini, sebagian besar kerabat bekerja untuk bertahan hidup, terkadang anak-anak juga dikaitkan dengan pekerjaan karena gaji kepala keluarga atau wali tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Jadi ada kecenderungan tingkat pengangguran menjadi rendah. Karena tingkat pendidikan yang mereka lulus rendah, tingkat upah atau gaji yang mereka peroleh sangat rendah dan berada di bawah garis kemiskinan. Jadi, bahkan dengan tingkat pengangguran yang rendah (mengingat fakta bahwa sebagian besar bekerja), mereka masih tetap miskin.

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Metode dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Objek penelitian yang di lakukan oleh peneliti yaitu badan pusat statistik yang berkaitan dengan pengaruh penggguran terhadap tingkat kemiskinan di provinsi jambi.

C. Jenis dan Sumber Data

Data primer sumberdata yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data badan pusat statistik (BPS) Provinsi Jambi yang berkaitan dengan Pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Jambi

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, interview (wawancara), kuesioner (angket), dan dokumentasi.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Pengujian Statistik Deskriptif di lakukan untuk memberikan gambaran umum tentang obyek yang sedang di teliti. Sehingga dapat memberikan infomasi awal tentang masalah yang diteliti. Hasil *Uji Statistic Deskriptif* penelitian ini dapat di gambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3 Hasil Uji Statistic Deskriptif

	KEMISKINAN	PENGANG...
Mean	25265.05	71554.20
Median	25007.00	54088.00
Maximum	54023.00	313075.0
Minimum	2046.000	1832.000
Std. Dev.	11871.04	62759.01
Skewness	0.301476	2.325522
Kurtosis	3.568371	8.956224
Jarque-Bera	1.573449	130.8744
Probability	0.455334	0.000000
Sum	1389578.	3935481.
Sum Sq. Dev.	7.61E+09	2.13E+11
Observations	55	55

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat di ketahui bahwa N atau jumlah data pada setiap variabel yaitu sebanyak 55 jumlah tersebut berasal dari 11 sampel dari penelitian ini yaitu jumlah pengangguran dan kemiskinan per kabupaten kota di provinsi jambi periode 2017-2021.

Dari tabel 4.3 dapat di ketahui bahwa kemiskinan memiliki nilai minimum sebesar 2046.000 dan nilai maksimum sebesar 54023.00. hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya kemiskinyang menjadi sampel dalam penelitian ini berkisar antara 2046.00 sapaai 54023.00 dengan jumlah rata-rata 25265.05 pada stndar devisi 11871.04.

2. Model Estimasi Data Panel

Model estimasi data panel si lakukan dengan tiga pendekatan yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Frixed Effect Model* (FEM), *Random Effect Model* (REM). Berikut akan peneneliti sajikan hasil regresi menggunakan ketiga model tersebut.

1. *Fixed Effect Model*

Tabel 4.5 Hasil Uji Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	24137.35	519.2874	46.48168	0.0000
PENGANGGURAN?	0.015760	0.006940	2.270985	0.0282
Fixed Effects (Cross)				
BATANGHARI—C	1661.315			
BUNGO—C	-4193.232			
KERINCI—C	-7633.306			
KOTAJAMBI—C	22988.46			
MERANGIN—C	8217.420			
MUAROJAMBI—C	-8167.845			
SAROLANGUN—C	307.4922			
SUNGAIPENUH—C	-22203.88			
TANJABBAR—C	10592.35			
TANJABTIM—C	832.4187			
TEBO—C	-2401.183			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.992827	Mean dependent var		25265.05
Adjusted R-squared	0.990993	S.D. dependent var		11871.04
S.E. of regression	1126.645	Akaike info criterion		17.08211
Sum squared resid	54581191	Schwarz criterion		17.52007
Log likelihood	-457.7580	Hannan-Quinn criter.		17.25147
F-statistic	541.1006	Durbin-Watson stat		1.640223
Prob(F-statistic)	0.000000			

3. *Pemilihan Regresi Data Panel*

Ada tiga pengujian yang di lakukan untuk menentukan model estimasi data panel yang kemudian di gunakan untuk mengelola data ppanel, yaitu Uji *Chow*, Uji *Hausman* dan Uji *Lagrange Multiplier*. Uji *Chow* untuk menentukan *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM). Uji *Hausman* di gunakan untuk penentuan antara *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM). Uji *Lagrange Multiplier* untuk penentuan antra *Common Effect Model* (CEM) atau *Random Effect Model* (REM)

a) Uji *Chow*

Tabel 4.7 Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	330.514778	(10,43)	0.0000
Cross-section Chi-square	239.522935	10	0.0000

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui nilai cross section chi square sebesar 58.487607 dengan nilai probability 0,0000. Hal tersebut berarti kurang dari 0,05 ($0,0000 < 0,05$) maka secara statistic H1 di terima dan menolak H0 sehingga dalam uji chow ini, model yang di pilih adalah fixed effect model (FEM).

b) Uji signifikansi

Berdasarkan uji chow, uji hausman dan uji lagrange multiplier model yang di pilih *Fixed Effect Model* (FEM). Selanjutnya dilakukan uji signifikansi dari model yang telah di pilih.

Tabel 4.10 Uji Signifikansi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	24137.35	519.2874	46.48168	0.0000
PENGANGGURAN?	0.015760	0.006940	2.270985	0.0282

PENGARUH PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN
DI PROVINSI JAMBI (2017-2021)

Fixed Effects (Cross)			
BATANGHARI—C	1661.315		
BUNGO—C	-4193.232		
KERINCI—C	-7633.306		
KOTAJAMBI—C	22988.46		
MERANGIN—C	8217.420		
MUAROJAMBI—C	-8167.845		
SAROLANGUN—C	307.4922		
SUNGAIPENUH—C	-22203.88		
TANJABBAR—C	10592.35		
TANJABTIM—C	832.4187		
TEBO—C	-2401.183		
Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.992827	Mean dependent var	25265.05
Adjusted R-squared	0.990993	S.D. dependent var	11871.04
S.E. of regression	1126.645	Akaike info criterion	17.08211
Sum squared resid	54581191	Schwarz criterion	17.52007
Log likelihood	-457.7580	Hannan-Quinn criter.	17.25147
F-statistic	541.1006	Durbin-Watson stat	1.640223
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dari tabel tersebut dapat di susumn persamaan regresidata panel sebagai berikut:
 $Kemiskinan = 24137.35 + 0.015760$

1. Nilai konstanta positif yaitu 24137.35 . hal ini menunjukkan bahwa variabel pengangguran konstan maka kemiskinan sebesar 24137.35 Nilai T tabel sebesar 1.67412 diperoleh dari $k = 2$ (jumlah variabel) $n = 55$ (jumlah observation) $df = n-k = 53$ dilihat dari persentase distribusi t dengantingkat signifikansi 5% maka disahihkan nilai t tabel sebesar 1.67412

Jika $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} maka H_0 di tolak , aratinya X berpengaruh terhadap Y

Jika $t_{hitung} <$ dari t_{tabel} maka H_0 diterima, artinya X tidak berpengaruh terhadap Y

Dapat di lihat dari tabel 4.9 di atas bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2.270985 lebih besar dari t_{tabel} 1.67412 ($2.270985 > 1.67412$) yang berarti bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y,

kemudian dilihat dari signifikansi sebesar 0,0282 kecil dari 0,05 yang berarti H_0 di tolak menandakan variabel berpengaruh signifikan. Koefisien regresi variabel pengangguran bernilai positif yaitu sebesar 0.015760. hal ini menunjukkan apabila pengangguran meningkat sebesar 1000 maka kemiskinan akan naik sebesar 0.015760 atau 16 jiwa dengan anggapan variabel bebas konstan.

- c) Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi di gunakan untuk mengukur seberapa besar variabel bebas mampu menjelaskan perubahan variabel terikatnya Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung besarnya pengaruh independen terhadap variabel dependen nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1 nilai koefisien yang mendekati 0 menjelaskan variabel dependen amat terbatas sedangkan nilai koefisien determinasi yang mendekati 1 berarti variabel independen hampir memberikan informasi yang di jelaskan untuk memprediksi variabel dependen.

Dilihat dari tabel 4.9 dapat di ketahui bahwa nilai R squared sebesar 0,992827 artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen 99,28% sedangkan sisanya 1,82% di pengaruhi faktor lain yang tidak terdapat pada model.

A. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan tahun 2017-2021

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan data kemiskinan, kemudian data pengangguran. Variabel-variabel tersebut digunakan untuk menganalisa dan membuktikan

hipotesis yang dirumuskan terbukti atau tidak. Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan uji T dan di mana bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel devenden. Data-data di peroleh melalui aplikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi. Penentuan sampel penelitian ini di ambil dari tahun 2017-2021.

Hal ini diperkuat oleh penelitian hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Povinsi Jambi. Semakin tingginya angka pengangguran maka semakin tinggi juga tingkat kemiskinan di provinsi jambi. Hal ini sama seperti teori cutler and katz and fowers menemukan bahwa tingkat pengangguran berhubungan positif dengan jumlah penduduk yang berada di bahwa garis kemiskinan atau dengan kata lain semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin besar tingkat kemiskinan dan ketika tingkat pengangguran menurun maka tingkat kemiskinan juga ikut turun. Dalam teori selalu ada hubungan antara pengangguran dan kemiskinan karena masyarakat yang menganggur tidak mempunyai penghasilan dan pengaruhnya adalah miskin.

Masalah pengangguran ini sangat mempengaruhi angka kemiskinan di Jambi. Sukino mengemukakan bahwa pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat dan itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai. Pengangguran menimbulkan masalah masyarakat baik dari aspek ekonomi, politik maupun agama. Bahkan Islam menilai bekerja merupakan salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah, sehingga bekerja dinilai sebagai bentuk ibadah, karena dengan bekerja berarti seseorang telah mempotensikan sumber daya alam yang telah disediakan oleh Allah. Sebaliknya, menganggur berarti menyia-nyiakan amanah Allah.. Masalah pengangguran bukanlah persoalan kecil yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia dewasa ini dan ke depan. Islam telah memproklamirkan dengan tegas baik di al-Quran.

Maka apabila kamu telah selesai dari sebuah uruan kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain (Q.S AL-INSYRAH : 7).

Menurut Sadono Sukirno, efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan.

Fakta hasil pengujian statistik ini didukung oleh fakta empiris dari tingkat pengangguran dan tingkat keSmiskinan. Hasil pengujian statistik yang menunjukkan pengaruh signifikan tersebut tampak pada perbandingan kedua variabel menunjukkan bahwa adanya perbandingan yang tidak searah antara tingkat pengangguran dengan tingkat kemiskinan. Secara umum kabupaten/kota dengan tingkat pengangguran yang tinggi mempunyai kecenderungan dengan tingkat kemiskinan yang relatif rendah, demikian sebaliknya. Hanya beberapa kabupaten dengan tingkat pengangguran yang tinggi dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dan sebaliknya.

Fakta empiris menunjukkan bahwa bahwa kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang memiliki pola hubungan yang tidak selalu searah antara tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Tingkat pengangguran yang lebih tinggi ternyata memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Jadi dalam kasus ini, hubungan antara pengangguran dan kemiskinan tidak selalu sesuai dengan asumsi teori ekonomi yang ada, tetapi memiliki hubungan yang terbalik. Fenomena ini dapat dijelaskan sebagai berikut, orang yang menganggur dalam sebuah rumahtangga, tetapi ada anggota rumah tangga yang lain bekerja dengan tingkat pendapatan tinggi sehingga cukup untuk menyokong penganggur. Dalam kaitannya dengan kemiskinan, penganggur yang ada di rumah tangga tersebut tidak secara otomatis menjadi miskin karena ada anggota keluarga lain yang memiliki pendapatan yang cukup untuk mempertahankan keluarganya hidup berada di atas garis kemiskinan. Kondisi tersebut (pada tingkat pengangguran yang meningkat dimana tingkat kemiskinan justru tidak ikut meningkat) banyak ditemui di daerah perkotaan. Pada saat kelompok bukan angkatan kerja (pelajar/mahasiswa) menamatkan pendidikan dan masuk dalam kelompok angkatan kerja,

tetapi tidak serta merta langsung bekerja, terkadang masa tunggu mendapatkan pekerjaan relatif lama. Selain itu ada juga yang sengaja menarik diri dari dunia kerja karena alasan mencari pekerjaan lebih baik. Kejadian tersebut akan menciptakan pengangguran (terutama terjadi pengangguran terdidik). Walaupun terjadi pengangguran, kehidupan kelompok ini masih ditanggung oleh anggota keluarga lain yang berpenghasilan relatif tinggi, dan dengan demikian rata-rata pendapatan masih berada di atas garis kemiskinan.

Al-Qur'an memandang bahwa kemiskinan adalah masalah sosial yang harus diatasi. Bahkan penyakit berbahaya yang wajib diobati. Islam tidak mendukung teori perilaku individu yang memandang bahwa yang bertanggungjawab atas kemiskinan adalah orang miskin sendiri, bukan masyarakat, pemerintah atau orang kaya. Tetapi Islam juga tidak sependapat dengan teori struktural yang hanya memfokuskan pada penyebab struktural terhadap masalah kemiskinan. Di satu sisi, Islam mengakui dan melindungi kepemilikan individu yang sah. Setiap orang yang memperoleh harta secara sah, dia berkuasa penuh atas harta tersebut. Islam mengakui perbedaan dalam mendapatkan harta dan memandangnya sebagai sesuatu yang wajar sesuai dengan perbedaan keahlian dan kemampuan setiap orang serta sebagai pendorong seseorang agar bekerja dan berusaha secara sungguh-sungguh. Hanya saja perbedaan tersebut harus dalam konteks perbedaan yang terkendali dan berkeadilan. Perbedaan yang mendorong semangat kerja dan produktivitas, melahirkan keharmonisan dan saling melengkapi, bukan kontradiksi dan konflik.

Kaum fakir dan miskin sebenarnya memiliki daya dan kemampuan untuk bangkit dari kemiskinannya. Mereka mampu mengatasi masalah sosial yang dihadapinya, akan tetapi mereka selama ini mereka belum menyadari tentang kemampuannya. Bekerja adalah senjata pertama dalam memerangi kemiskinan. Bekerja adalah penyebab utama penghasil harta/benda dan unsur utama pula dalam upaya memakmurkan diri dan bumi Allah. Dalam naungan sistem dan peraturan Islam, tidak ada seorang pekerja pun yang tidak mendapatkan upah dari hasil jerih payah dan keringatnya. Perintah bekerja ini terkait dengan kedudukan dan tujuan kehadiran manusia di bumi ini yang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah. Sebagai hamba Allah (abdullah) manusia bertugas untuk mengabdikan (beribadah kepada Allah) (QS. al-Dzariyat [51]:56).

Artinya: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku (QS. al-Dzariyat [51]:56).

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi pada tahun 2017- 2021

DAFTAR REFERENSI

- [1] Titin Agustin Nengsih Dan Nurfitri Martaliah. 2021 *Regresi Data Panel Dengan Softwer Eviews*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi
- [2] Rustanto, B. 2015. *menangani kemiskinan*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- [3] Permana, DD. 2018. Analisis Pengangguran Di Yogyakarta Tahun 2005-2015.
- [4] Sukirno,S. 2011. *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta Raja Grafindo Persada.
- [5] Jalaluddin, J. 2010. *pengaruh pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi tahun 2010-2016*
- [6] Salamadian. 2018. *Pengangguran : Pengertian, Penyebab Dan Jenis-Jenis Pengguran* "Desember 21,2018
- [7] Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- [8] Gustari, V. 2019. "Pengangguran Di Indonesia"

Jurnal/skripsi

- [9] Dahma Amar Ramdhani, DA., Setyadi, D., dan Wijaya, A. 2017. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Dan Kemiskinan Di Kota Samarinda*. Universitas Mulawarman.
- [10] Titin Agustin Nengsih, Arsa Arsa, Pradita Sari Putri. *Determinan Minat Menabung Masyarakat di Bank Syariah: Studi Empiris di Kota Jambi*. 2021. *Journal of Business and Banking*, Vol 11 No.1
- [11] Syahrullah, D. 2014. *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten Tahun 2009-2012*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- [12] Titin Agustin Nengsih. (2013). Analisis Minat Masyarakat Terhadap Baitul Mal Watamwil Di Kota Jambi. *Statistika: Journal of Theoretical Statistics and Its Applications*, 13(1), 33–38.
- [13] Duma Lasmaria Siagian, *Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran* (Studi Kasus di Sumatera Utara). *Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Pascasarjana*.
- [14] Titin Agustin Nengsih, Nofrianto, Elyanti Rosmanidar, Wisnu Uriawan. Corporate Social Responsibility on Image and Trust of Bank Syariah Mandiri. 2021. *Al Iqtishad*, 13 (1)
- [15] Fatkhul Mufid Cholili, “*Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*,”
- [16] Fitri., Junaidi. 2016. *Pengaruh pendidikan, upah dan kesempatan kerja terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Jambi* e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Vol. 5. No.1.
- [17] Qodrunnada, L. 2017. *Analisis Pengaruh Pendidikan Pertumbuhan Ekonomi Dan Rasio Gini Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015*.
- [18] Hartanto, TB., Maskuri, SU. 2017. *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Jumlah Pengangguran Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014* “*Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan* 02, No.1.
- [19] Usman, U dan Diramita. 2021. *Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau*, *jurnal Ekonomi Regional Unimal* Volume 01 nomor 02.
- [20] Titin Agustin Nengsih, Frédéric Bertrand, Myriam Maumy-Bertrand, & Nicolas Meyer. (2019). Determining The Number Of Components In PLS Regression On Incomplete Data Set. *Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology*, 18(6).